

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR DAN MEKANISME
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN DAN
KEJAHATAN ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS DI WILAYAH
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH)**

SYAHIRUDDIN DAENG MARALA / D 101 12 414

Pembimbing

Dr. JOHNNY SALAM, SH., MH

Dr. RIDWAN TAHIR, SH., MH

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)”. dengan identifikasi masalah, bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri serta bagaimana prosedur dan mekanisme jika seorang anggota polri melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan serta prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri dengan melihat studi kasus di wilayah kepolisian daerah Sulawesi Tengah.

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri adalah melalui proses persidangan disiplin yang dimulai dari tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi / hukuman, dengan mengacu pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia, disamping itu mekanisme dan prosedur perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri adalah berdasarkan prinsip equality before the law bahwa persamaan didepan hukum berlaku bagi anggota polri bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diadili melalui peradilan umum, hal tersebut berdasarkan TAP MPR-RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI, sehingga membawa konsekuensi logis kepada institusi Polri yang sebelumnya berstatus sebagai militer berubah menjadi status Sipil sehingga tunduk dan patuh terhadap peradilan umum.

Kata Kunci : disiplin, kejahatan, prosedur, mekanisme

I. PENDAHULUAN

Di awal masa reformasi, sejumlah pembenahan telah dilakukan dalam tubuh Polri. TAP MPR-RI No.

VI / MPR / 2000 dan TAP MPR-RI No. VII / MPR / 2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri

secara terpisah dari TNI. Walaupun DPR juga telah berhasil menyelesaikan UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Polri tetapi, reformasi Polri masih jauh dari harapan masyarakat. Disamping itu pemisahan Kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil disamping itu di bidang administrasi, penegakan hukum maupun penegakan disiplin anggota Polri telah ditetapkan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memainkan peran tersebut Polri dituntut untuk

melaksanakan secara profesional serta didukung oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap Anggota Polri di tengah masyarakat karena sebagai salah satu tombak penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat mulai dari persoalan kecil seperti masalah pelanggaran lalu lintas sampai masalah serius yang menyangkut tindak pidana kejahatan. Anggota Polri selalu bersinggungan dengan masyarakat, hal ini sangat rentan sehingga cenderung menimbulkan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, oleh karenanya penanganan yang berkualitas dan profesional merupakan suatu keharusan bagi setiap insan anggota Polri.

Sesuai dengan tujuan, fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), keberadaan Polri bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara serta tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak anggota masyarakat dengan harapan tidak menyimpang atau melanggar hukum, apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi pelanggaran hukum maka Anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Perubahan cara berpikir telah membawa konsekuensi yang menggiring institusi Polri untuk mereformasikan diri melakukan perubahan substansi atas 3 (tiga) aspek penting institusi, yaitu aspek instrumental, struktural dan kultural. Pada aspek instrumental antara lain dibidang hukum adalah dijabarkannya Undang-Undang Polri kedalam Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri (penyebutan selanjutnya disingkat, yaitu PP No. 3/2003). setiap anggota Polri yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut akan diproses sesuai dengan

ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan dalam peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. VII/MPR/2000 yaitu Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Dalam konteks demokrasi, institusi kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,¹ yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian

¹ Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

perkara pelanggaran disiplin anggota Polri ?

- 2) Bagaimana prosedur dan mekanisme jika seorang anggota Polri melakukan tindak pidana ?

II. PEMBAHASAN

A. PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

Penyelesaian pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/ atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.

Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas laporan, tertangkap tangan, temuan oleh petugas. Laporan sebagaimana

dimaksud diatas disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran disiplin. Laporan yang disampaikan, dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provos. Tertangkap tangan dapat langsung diperiksa oleh Provos. Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa surat perintah. Temuan merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural. Hasil temuan selanjutnya diserahkan kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya.

Bentuk penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Tindakan disiplin diberikan, kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedemikian ringan sifatnya, penjatuhan sanksi langsung dilaksanakan oleh Atasan tanpa melalui siding disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik. Sanksi tersebut bersifat pembinaan dan tidak bertentanan dengan peraturan perundang-undangan dan

tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin, adapun tahapan dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran oleh anggota Polri :

1. Penerimaan Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota Polri, dituangkan dalam laporan polisi (LP). Laporan Polisi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan SPP dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pelanggar guna pemeriksaan dan terhadap adanya laporan yang belum jelas perlu dilakukan penyelidikan. Dilakukan oleh anggota provos Polri atau petugas yang ditunjuk oleh ankum untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pemanggilan dilaksanakan oleh Provos atau pejabat yang ditunjuk oleh ankum atau atasan ankum. Petugas yang menyampaikan surat pemanggilan adalah setiap anggota Polri. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diterima kepada keluarganya atau ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Terhadap terperiksa yaitu setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin, yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan serta tidak memenuhi panggilan untuk ketigakalinya, maka petugas dapat membawa disertai dengan surat perintah. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena dinas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh

atasannya, Provos dapat melakukan pemeriksaan di tempat.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan pelanggaran disiplin adalah proses kegiatan yang dimulai dari pemeriksaan oleh provos Polri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan pemeriksaan di depan sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

- a. Tantama dan bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- b. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- c. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama.
- d. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi ahli. Pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh beberapa anggota yang menyangkut 2 (dua) daerah kewilayahan atau lebih dapat dilakukan oleh Provos kesatuan yang lebih tinggi (Polwil/Polda/Mabes Polri). Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh kesatuan anggota pelanggar yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, pemeriksaannya ditangani oleh Provos dari kesatuan yang lebih tinggi.

Pemeriksaan oleh Provos dilaksanakan berdasarkan perintah Atasan Ankom. Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dibuat dalam satu berkas perkara dan diserahkan kepada Ankom guna diselesaikan perkaranya melalui sidang disiplin. Terhadap pelanggar disiplin tertentu

yang sifatnya memberatkan, provos dapat melakukan pengamanan dalam rangka keselamatan pelanggar atau orang lain dan pencegahan melakukan perbuatan yang dilarang serta kepentingan penyelesaian pemeriksaan.

Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud, apabila pelanggaran dilakukan Negara / wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam penugasan operasi khusus kepolisian, atau dalam kondisi siaga I. Tempat pengamanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Ankum. Pengamanan dilakukan selama-lamanya 1 x 24 jam yang selanjutnya diserahkan kembali pada Ankum. Guna memperkuat pembuktian, pemeriksa dapat melakukan pengambilan dan / atau penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin.

Hasil pemeriksaan terhadap saksi, terperiksa, saksi ahli, dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin disusun menjadi satu berkas pemeriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran disiplin. Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana

dimaksud terdiri dari sampul berkas perkara pelanggaran disiplin, resume, laporan polisi, surat perintah pemeriksaan, surat panggilan, berita acara pemeriksaan terperiksa, saksi dan saksi ahli, daftar barang bukti, dan berita acara penyerahan dan penerimaan barang bukti. Berkas perkara pelanggaran disiplin dilimpahkan oleh provos kepada Ankum. Berkas perkara pelanggaran disiplin, apabila pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada provos untuk kemudian dilimpahkan kepada Ankum. Ankum setelah menerima berkas perkara pelanggaran disiplin meminta pendapat hukum, dari satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dimaksud selambat-lambatnya 7 hari telah diserahkan kepada Ankum.

3. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin

Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin kewenangan Ankum. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankum harus menyelenggarakan

sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Susunan keanggotaan, dan perangkat sidang, serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri. Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Perintah Ankum.

4. Penjatuhan

Hukuman

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan dan / atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa, serta barang bukti Ankum menjatuhkan putusan hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

5. Pelaksanaan

Hukuman

Hukuman disiplin dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin. Aslinya diberikan kepada

terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Hukuman disiplin dimaksud rnenyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada Terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum. Pelaksanaan putusan sidang disiplin dimaksud diserahkan kepada Provos.

Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota

Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos.

Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/ 43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang

selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)”.Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, Jenis pelanggaran, jenis hukuman, Nomor putusan hukuman, Batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos. Paminal, dan Ankum pelanggar.

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap

jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.²

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan.

Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak

² H.Pudi Rahardi, M.H. Hukum Kepolisian, *Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 172.

tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturanya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan. Menurut M. Friedman dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan,

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini selain ketiga faktor di atas, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada empat (4) fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu : pembuatan hukum (*the legislation of law* atau

Law and rule making), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).

B. PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA POLRI

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub Bidang Provos untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana. Dalam Dir Reskrim anggota Polri pelaku tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun apabila laporan atau

pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provos, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Anjum. Apabila Anjum melihat bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri maka anggota Polri tersebut terkena Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang dianggap telah membuat buruk nama institusi kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri maka Anjum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

C. PENUTUP

a. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap disiplin anggota Polri di Polda Sulawesi Tengah dilakukan oleh atasan langsung, atasan tidak langsung, atau anggota Provos sesuai lingkup tugas dan kewenangannya terhadap

anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sedemikian ringan. Sementara hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum dan / atau Atasan Ankum dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin, diselesaikan menurut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana dilakukan dengan sidang peradilan umum yang diproses sesuai dengan

tahapan-tahapan yang sama dengan masyarakat biasa bila melakukan tindak pidana. Selain itu, anggota Polri pelaku tindak pidana juga mendapat hukuman yang berasal dari lembaga kepolisian yang dapat diproses melalui ketentuan Disiplin atau Kode Etik Profesi Hukum Polri. Bila tindak pidana itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka anggota Polri terkena Sidang Disiplin. Namun, apabila tetap dianggap sebagai tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan disidangkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Hukuman yang diterima anggota Polri yang berasal dari dalam lembaga Polri terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana ditentukan oleh Ankum yang telah diberi wewenang Untuk menangani kasus tersebut.

b. SARAN

Perlunya diberikan penyuluhan terhadap masyarakat, agar jangan ragu-ragu melaporkan atau mengadukan anggota Polri yang

melakukan tindak pidana apa pun karena Polri membutuhkan masukan dan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dari kepolisian. Polri perlu meningkatkan adanya penyuluhan baik itu mengenai Peraturan Pemerintah, Keputusan keputusan Kapolri maupun Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia agar anggota Polri dapat memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hukum dan mengurangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang tiap tahunnya

makin bertambah. Perlunya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai proses penanganan terhadap anggota Polri baik itu mengenai proses diperadilan umum maupun hukuman yang berasal dari dalam instansi kepolisian sendiri. Adanya ketentuan yang jelas mengenai hukuman terhadap anggota Polri yang terkena Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik Profesi Polri tidak hanya berdasarkan keputusan Ankum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

Abdul kadir Muhammad, Etiksa profesi Hukum , citra Aditiya Bakti, bandung 1997

E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum : Sebua pendekatan sosioreligius, cet.I,jakarta,penerbit stori Grafik ,2001

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.

Supriadi,Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum Di Indonesia, penerbit sinar Grafika ,palu ,2006

Zainudin Ali, filsafat Hukum, sinar Graha, tahun 2006

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang –Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL 8 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik profesi Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri.

BIODATA



NAMA : SYAHIRUDDIN DAENG MARALA
STAMBUK : D 101 12 414
TTL : BANRI, 14 FEBRUARI 1979